

BAB III

MASUKNYA MULTINATIONAL CORPORATION DAN PENGARUHNYA TERHADAP INDUSTRI DI INDONESIA

Dari penjelasan di bab sebelumnya, dapat dikatakan bahwa pengaruh terbesar dari perkembangan ekonomi berasal dari perusahaan multinasional atau yang biasa disebut dengan MNCs. Pengaruh perusahaan ini terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi dunia mempengaruhi pembuatan kebijakan atau keputusan dalam hal penanaman modal, baik di tingkat domestik maupun di tingkat internasional dan secara langsung dapat mendorong perkembangan di dunia bisnis internasional. Perusahaan multinasional dan penanaman modal merupakan suatu hal yang berbeda, karena penanaman modal tumbuh dan berkembang dalam hal kepentingan, sedangkan perusahaan yang menanam modal asing tumbuh dan berkembang dalam jumlah. MNCs mempunyai cara kerja yang sama dengan penanaman modal asing karena beroperasi secara berpindah-pindah untuk mengantisipasi serta mengejar peluang yang dapat menguntungkan mereka.

A. Definisi Penanaman Modal Asing

Istilah penanamam modal adalah sebuah istilah yang berasal dari Bahasa Inggris yaitu *investment*.⁵¹ *Investment* atau penanaman modal (investasi) berasal dari bahasa latin *investire* (memakai) yang diartikan berbeda-beda pengertiannya.⁵² Investasi dapat diartikan menjadi penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau

⁵¹ David Kairupan S.H., LL.M, "Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia", Prenada Media Indonesia.

⁵² Christine S.T Kansil, "Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia", Sinar Grafika Indonesia.

proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan.⁵³ Penanaman modal ini dilakukan secara langsung oleh investor lokal dan secara tidak langsung oleh pihak asing melalui *Foreign Direct Investment*. Penanaman modal atau yang biasa disebut dengan investasi dilakukan secara langsung oleh investor lokal maupun investor asing melalui *Foreign Direct Investment*. Dan dalam Undang Undang Penanaman Modal tidak ada hal yang membedakan antara investor lokal dengan investor asing. Dan secara umum, Ida Bagus Rahmadi Supanca mengatakan bahwa investasi menjadi suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi (*natural person*) maupun badan hukum (*juridical person*) dalam upaya meningkatkan dan mempertahankan nilai modalnya dalam bentuk tunai (*cash money*), peralatan (*equipment*), aset yang tak bergerak, hak kekayaan intelektual, maupun keahlian.⁵⁴

Investasi menjadi faktor penentu dalam perekonomian suatu negara, karena dengan meningkatnya investasi maka total pengeluaran negara akan ikut meningkat atau dengan kata lain daya beli dan daya saing nasional mengalami peningkatan pula.⁵⁵ Seperti yang dikemukakan oleh *John W Head* ada tujuh keuntungan investasi asing yaitu⁵⁶ :

1. Menciptakan lowongan kerja bagi penduduk negara tuan rumah sehingga mereka dapat memperoleh dan meningkatkan penghasilan dan standar hidup mereka.

⁵³ Kamus Besar bahasa Indonesia Cet. II hal 337

⁵⁴ Ida Bagus Rahmadi Supanca, "Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia", Bogor; Ghalia Indonesia, 2006, hal 1-2

⁵⁵ Salim HS dan Budi Sutrisno, "Hukum Investasi di Indonesia", Jakarta: Raja Grafindo Perasada, 2008, hal 86-87

⁵⁶ *Ibid* hal 93

2. Menciptakan kesempatan untuk melakukan penanaman modal bagi penduduk negara tuan rumah, sehingga mereka dapat berbagi pendapatan dari perusahaan-perusahaan baru.
3. Meningkatkan kegiatan ekspor dari negara tuan rumah untuk mendatangkan hasil tambahan yang berasal dari luar yang berguna untuk keperluan dan kepentingan penduduknya.
4. Menghasilkan pelatihan-pelatihan yang dalam hal ini ilmunya dapat digunakan oleh penduduk untuk mengembangkan industri lainnya.
5. Memperluas potensi kewaspadaan negara tuan rumah dengan cara memproduksi barang setempat untuk menggantikan barang impor.
6. Menghasilkan pendapatan dari pajak tambahan yang dalam hal ini dapat dipergunakan penduduk tuan rumah.
7. Membuat sumber daya alam maupun sumber daya manusia menjadi lebih bermanfaat.

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan investor asing di suatu negara mempunyai manfaat yang luas (*multiplier effect*) karena kehadiran investor asing dapat menyerap tenaga kerja dinegara penerima modal, dapat menciptakan permintaan bagi produk dalam negeri sebagai bahan baku, menambah devisa apalagi investor asing yang berorientasi ekspor dan juga dapat menambah penghasilan negara dari sektor pajak serta adanya alih teknologi maupun alih ilmu pengetahuan (*Transfer of Technology and Knowledge*).

Dibalik sisi politik, sisi ekonomi dan sisi hukum yang merupakan aspek dasar pertimbangan bagi calon investor sebelum menanamkan modalnya disuatu negara. Ada tiga faktor yang menjadi aspek penting bagi calon investor untuk melihat apakah investasi disuatu negara akan mendatangkan keamanan, kenyamanan dan keuntungan bagi investor. Faktor-faktor tersebut adalah faktor kestabilan politik yang merupakan aspek yang sangat

diperhitungkan bagi investor asing sebelum datang ke suatu negara. Investor asing akan mencermati ke stabilan politik suatu negara sebagai iklim yang kondusif untuk usaha-usaha penanaman modal asing. Faktor ekonomi pun sangat menentukan bagi keinginan investor ke suatu negara untuk menanamkan modalnya, kesempatan ekonomi bagi investor seperti ketersediaan sumber daya alam.⁵⁷

Untuk menarik Investor asing datang ke Indonesia pun ada beberapa faktor yang berkaitan dengan hukum yang harus dipenuhi yaitu peraturan-peraturan kebijakan yang tetap dan konsisten yang tidak terlalu cepat berubah dan dapat menjamin adanya kepastian hukum, karena ketiadaan kepastian hukum dapat menyulitkan perencanaan pembangunan jangka panjang usaha mereka. Prosedur perizinan yang berbelit-belit pun dapat mengakibatkan biaya yang tinggi. Adanya jaminan terhadap investasi dan proteksi hukum mengenai hak atas kekayaan investor, sarana dan prasarana yang ada dapat menunjang terlaksanakannya investasi mereka dengan baik.⁵⁸

Dari pembahasan diatas, bahwa penanaman modal asing yang dilakukan oleh perusahaan multinasional (MNCs) pada suatu negara dapat memberi dampak positif karena mengakibatkan perluasan lapangan pekerjaan, alih teknologi, pengembangan teknologi substitusi import untuk menghemat devisa, mendorong berkembangnya industri barang-barang eksport non migas untuk mendatangkan devisa, pembangunan sarana dan prasarana, serta dapat membangun daerah tertinggal.

B. Sejarah Penanaman Modal (Investasi) Di Indonesia

Dengan masuknya penanaman modal asing ke Indonesia dapat memulihkan perekonomian karena hal

⁵⁷ Erman Rajagukguk, "Hukum Investasi di Indonesia: Pokok Bahasan", Jakarta; Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006, hal 50

⁵⁸ *Ibid hal 52*

tersebut dapat memicu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, bahkan dapat menyerap tenaga kerja, *transfer of technology*, serta masuknya *capital inflow* dan devisa hasil ekspor. Terlepas dari hal tersebut, penanaman modal juga menimbulkan dampak yang lain karena menyebabkan luputnya pengawasan pembangunan terutama sektor pertanian menjadi terabaikan.

Selama periode orde lama berlangsung, adanya ketidakstabilan politik di dalam negeri yang dicerminkan dengan adanya pemberontakan di beberapa daerah menyebabkan ekonomi Indonesia nyaris hancur. Pada masa Soekarno pun, ketidakstabilan politik mengakibatkan ekonomi tidak stabil karena pada masa tersebut sering terjadinya pergantian kabinet selama demokrasi parlementer terjadi. Sekitar tahun 1957, Soekarno mulai mencanangkan sesuatu yang dinamakan “Ekonomi Terpimpin” guna memperkuat sistem ekonomi dan selama tahun tersebut terjadi nasionalisasi dengan perusahaan Belanda. Dengan dicanangkannya “Ekonomi Terpimpin”, sistem politik dan sistem ekonomi yang ada di Indonesia menjadi semakin dekat dengan haluan sosialis/komunis. Soekarno percaya bahwa pemikiran Marxisme menjadi satu-satunya senjata ampuh untuk melawan kapitalisme dan saat itu prinsip individualisme, persaingan bebas dan perusahaan pribadi maupun swasta ditentang oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia karena dengan munculnya perusahaan tersebut, masyarakat mengkaitkan hal tersebut dengan pemikiran yang kapitalisme. Hingga akhir tahun 1950-an, perusahaan-perusahaan Belanda menjadi sumber utama penanaman modal asing di Indonesia.

Pemerintah era Soeharto pun terbilang berbeda dari pemerintah sebelumnya karena paradigma pembangunan ekonomi lebih mengarah kepada persiapan ekonomi pasar dan politik ekonomi dengan upaya menggerakkan kembali roda ekonomi. Pada era ini, Indonesia mulai menjalin

kembali hubungannya dengan pihak barat dan perlahan menjauhi ideologi komunis. Indonesia pun kembali masuk menjadi anggota dari Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) yang juga dalam hal ini Indonesia menjalin hubungan kerjasamanya dengan Bank Dunia dan *International Monetary Fund* (IMF) yang sempat terputus pada saat Soekarno menjabat. Dengan membaiknya hubungan antar kedua lembaga dengan Indonesia, pada akhirnya pemerintah berhasil mendapatkan pinjaman untuk membiayai defisit anggaran belanjanya, yang dimana sumber dana pinjaman ini banyak berasal dari pinjaman bilateral dari sejumlah negara barat seperti Amerika Serikat, Belanda, dan Inggris. Dan selama pemerintahan orde baru, dibentuklah Undang-Undang Penanaman Modal Asing yang dikeluarkan pada tahun 1967 dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri pada tahun 1968 guna mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

1. Penanaman Modal Di Era Belanda

Pada awalnya, penanaman modal pertama kali dilakukan di Indonesia ketika dibentuknya kebijakan oleh pemerintah Hindia Belanda yang ingin memperkenalkan bahwa Eropa masuk untuk menanamkan modalnya di bidang perkebunan pada tahun 1870. Pada era Belanda ini, adanya pengambil alihan hak dan kewajiban oleh badan usaha yang bernama *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) yang merupakan orang-orang dari pemerintahan Belanda pada tahun 1799. Akibat adanya hal tersebut, pemerintah Belanda terjun secara langsung dalam membuka perdagangan bahan rempah-rempah yang berada di Indonesia. Disamping itu pada tahun 1870, pemerintah Belanda pun mulai membuka lahan pertanian di Indonesia dengan mengeluarkan sebuah aturan pertanahan yang berisi bahwa pemerintah Belanda memberikan keleluasaan kepada investor dari Eropa terutama yang memiliki hubungan kerjasama yang dekat dengan pemerintah Belanda untuk membuka usahanya di Indonesia, kecuali sektor pertambangan dan perdagangan akan tetap dikuasai

oleh pemerintah Belanda. Sedangkan dalam sektor perkebunan karet, kelapa sawit, pemerintah Belanda membuka peluang besar seiring dengan banyaknya permintaan pasar dunia yang terus menerus meningkat pada saat itu. Maka dari itu, pemerintah Belanda sangat melindungi perkebunan secara langsung untuk menompang struktur tradisional yang berada di Indonesia. Pada pertengahan abad 19, pemerintah Belanda berusaha agar modal swasta asing tidak memasuki sektor pertanian, tetapi pada tahun-tahun terakhir pemerintah kolonial menerapkan sebuah sistem yaitu sistem tanam paksa. Ketika pemerintah Belanda memulai sistem tersebut, banyak hal yang merubah dasar politik kolonial yang mengakibatkan terbukanya peluang bagi investor swasta asing untuk meminta konsesi dalam mengembangkan usahanya. Kejadian tersebut mengakibatkan para investor asing Eropa mendapatkan izin untuk menyewa tanah yang belum digarap dan diizinkan untuk membuka usahanya mulai dari mengolah tanaman tembakau, kayu manis, dan lain-lain.

Adanya masalah politik dan keamanan yang ada dalam negeri serta aksi dari tentara kolonial Belanda yang ingin melakukan penjajahan menjadi faktor Indonesia terhambat dalam menata perekonomiannya. Pada tahun 1949, setelah adanya penyerahan kedaulatan dari Hindia Belanda kepada Indonesia munculah berbagai rencana pembangunan nasional untuk Indonesia. Di dalam RUP (Rencana Urgensi Pembangunan) dijelaskan bahwa Indonesia diizinkan melakukan penanaman modal termasuk penanaman modal asing untuk dapat lebih aktif dalam industri namun harus memenuhi syarat dari pemerintah Indonesia yaitu 51% dari sahamnya adalah milik Indonesia, tetapi dalam hal tersebut diberlakukan pembatasan pada sektor- sektor tertentu yang dimana itu adalah milik domestik dan asing.⁵⁹

⁵⁹Asmari Utami. "Sejarah Perkembangan Investasi di Indonesia" dalam <https://www.scribd.com/document/360133281/Sejarah->

2. Penanaman Modal Di Era Jepang

Pada saat Perang Dunia II terjadi, Belanda digantikan oleh Jepang untuk menduduki Indonesia pada tahun 1942. Pada saat Jepang memegang kegiatan penanaman modal asing menyebabkan penurunan drastis pada tahun 1942 hingga 1945. Penanaman modal pun terhenti dan perlahan mulai menghancurkan struktur ekonomi yang telah dibangun oleh pemerintah Belanda. Jepang pun melarang adanya impor bahan mentah dalam jumlah yang besar dan segala macam bentuk kegiatan yang menunjang perekonomian yang mengakibatkan pada masa itu tidak ada kegiatan penanaman modal. Aktiva milik asing pun diambil alih oleh pemerintah Jepang kemudian dikembalikan lagi setelah Jepang kalah dan setelah seteru antara Belanda dan Indonesia pada tahun 1949. Setelah Indonesia merdeka, disini pemerintah Indonesia memulai babak baru dengan cara mengelola perekonomian negaranya sendiri untuk melaksanakan pembangunan nasional, meskipun pada saat itu untuk kegiatan penanaman modal terbilang tidak terlaksana secara lancar. Selama 17 tahun berikutnya, Indonesia pun menjadi negara yang mengimpor modal dan teknologi dan pada saat itu penanaman modal secara langsung oleh *Foreign Direct Investment* belum ada.⁶⁰

Rencana Urgensi Ekonomi, yang disusun oleh Menteri Perdagangan dan Industri Soemitro Djohadikusumo pada tahun 1951 pun dimaksudkan sebagai upaya mendorong industri sebagai penggerak perekonomian, karenanya juga disebut Rencana Urgensi Industri. Perusahaan asing bisa menanamkan modal di luar industri kunci, dengan syarat bekerjasama dengan perusahaan swasta nasional. Thee Kian Wie juga

Perkembangan-Investasi-Di-Indonesia-1 diakses pada tanggal 16 Februari 2018 pukul 13.25

⁶⁰ *Ibid*

menuliskan dibukunya selama berlangsung rencana tersebut dapat dibangun pabrik yang pelaksanaannya bersifat sporadis.⁶¹ Rencana Urgensi Ekonomi kemudian dihapus pada 1956 karena menurut Soemitro Djohadikoesoemo seorang ahli ekonomi Indonesia, rencana tersebut menekankan buruknya organisasi, tidak kompetennya manajemen, kurang praktisnya administrasi pemerintah dan peraturan keuangan, dan langkanya ahli teknik sebagai penyebab tidak ada kemajuan dan kemudian diganti lagi menjadi Rencana Pembangunan Lima Tahun Pertama Indonesia. Tak lama sesudah itu dirancang lah kebijakan ekonomi orde baru oleh Soeharto yang resmi menjabat presiden.

David Ransom, seorang wartawan Amerika menyebut adanya keterlibatan Amerika dalam kebijakan ekonomi Orde Baru. Dengan adanya kebijakan pintu terbuka, investasi asing menjadi prioritas utama untuk mendapatkan dana, selain utang luar negeri. Kebijakan tersebut dianggap jalan paling baik karena menerima usulan *International Monetary Fund/International Bank for Reconstruction and Development* untuk mengambil kebijakan pintu terbuka yang dimana dalam ini dapat memungkinkan investor dari berbagai negara masuk ke Indonesia. Era orde baru pun resmi mengeluarkan UU No. 1/1967, setelah melalui perdebatan sengit di parlemen untuk menarik investor asing dan menjamin keamanan investasinya di Indonesia. UU No. 1/1967 berisi berbagai insentif dan jaminan kepada para calon investor asing. Di dalamnya termasuk masa bebas pajak dan jaminan tidak adanya nasionalisasi, kecuali dianggap perlu bagi kepentingan nasional dan dengan kompensasi penuh sesuai

⁶¹ M. F. Mukthi, "Riwayat Masuknya Modal Asing Ke Indonesia", dalam <http://historia.id/modern/riwayat-masuknya-modal-asing-ke-indonesia/3#detail-article> diakses pada tanggal 16 Februari 2018 pukul 15.31

hukum internasional. Kebijakan pintu terbuka bagi modal asing ini menarik investor baru, terutama dari sektor pertambangan dan manufaktur. Freeport jadi yang pertama masuk dalam menanam modal, kemudian disusul oleh perusahaan tambang dan kayu dari sejumlah negara.⁶²

3. Penanaman Modal Di Era Saat Ini

Perkembangan perusahaan asing terus mengalami peningkatan dari zaman ke zaman. Peningkatan tersebut diawali pada era Belanda ketika VOC memasuki wilayah Indonesia, hingga pada akhirnya diikuti oleh berbagai perusahaan asing yang berteknologi modern. Salah satu program utama pemerintahan Jokowi-JK yaitu pembangunan infrastruktur. Hal tersebut tercermin dalam beberapa pernyataan bahwa pembangunan infrastruktur sangat penting untuk menari investasi masuk ke dalam pendanaan proyek infrastruktur Indonesia. Agar proyek infrastruktur itu terlaksana, pemerintah Jokowi menetapkan dana kebutuhan akan hal tersebut mencapai sekitar Rp 4.800 Triliun hingga tahun 2019 mendatang, tetapi pemerintah hanya memiliki dana sekitar Rp 1.131 triliun, sehingga dapat dikatakan bawah pemerintah memiliki dana yang kurang cukup besar. Dalam proyek infrastruktur ini, investasi merupakan aset yang penting karena hal ini menjadi jalan utama bagi ekspor modal maupun kelebihan produksi hasil industri untuk bisa berputar dan melahirkan mega profit dari berbagai negeri yang tergantung atas investasi dan utang. Dana yang disediakan untuk proyek infrastruktur kian bertambah sejak 2014, bahkan pada tahun tersebut, dana yang tersedia mencapai US\$ 24,2 miliar atau naik 45% dari tahun sebelumnya. Melalui komando Bank Dunia terbentuklah lembaga *Publik Private Partnership (PPP)* dengan cara mengumpulkan pemerintah, lembaga pembangunan dan investor swasta untuk mendanai proyek infrastruktur global yang kemudian dikenal dengan nama

⁶² *Ibid*

Global Infrastructure Facilities (GIF) yang berada dibawah naungan *World Bank*.

Dengan adanya GIF ini, terbentuklah kolaborasi bagi negara donor, bank pembangunan multilateral untuk bersama-sama membiayai pembangunan infrastruktur sesuai dengan skema yang dibentuk oleh Lembaga PPP ke berbagai negeri dengan sasaran pasar yang sedang berkembang (*emerging market*) maupun negara yang dianggap sedang tumbuh (*emerging country*) seperti Tiongkok, India, Bangladesh, Brasil, Afrika Utara maupun Indonesia yang diperkirakan membutuhkan dana sebesar US\$ 1 triliun untuk 5 tahun kedepan. Negara dan Lembaga-lembaga imperialis berlomba-lomba untuk memberikan bantuan utang untuk berbagai proyek infrastruktur yang ada. Saat pemerintah Indonesia didanai untuk pembangunan infrastruktur disaat yang bersamaan juga negara imperialis mendesak agenda perdagangan bebas agar barang dan modalnya bisa masuk tanpa hambatan ke negara berkembang. Seperti yang sedang marak saat ini yaitu perundingan perdagangan bebas dan investasi seperti *Regional Comprehensive Economic Partnership*, *Trans Pacific-Partnership* dan perundingan lain dalam *World Trade Organization*. Berbagai skema “kerja sama kemitraan ekonomi dan perdagangan” lintas regional Asia-Pasifik menjadi wadah dari berbagai skema investasi, perdagangan barang dan jasa, lalu lintas pekerja yang akan lebih cepat dan murah jika ditunjang bersamaan dengan pembangunan infrastruktur utama. Sehingga apabila infrastruktur suatu negara telah berkembang dengan pesat maka hal tersebut akan mempermudah ketertarikan pihak asing untuk menanamkan modalnya ke suatu negara.⁶³

⁶³ “Kepentingan Dibalik Masifnya Pembangunan Infrastruktur Pemerintahan Jokowi”, dalam <http://agraindonesia.org/kepentingan-di-balik-masifnya->

Untuk negara yang semakin massif melakukan perbaikan infrastruktur, dimanfaatkan pula oleh perusahaan dengan merk dagang yang sudah terkenal untuk berinvestasi di Indonesia. Perusahaan tersebut adalah Nike. Nike Inc merupakan salah satu perusahaan multinasional yang berasal dari Amerika Serikat yang juga berinvestasi di Indonesia. Perusahaan ini pada awalnya didirikan di Oregon pada tahun 1964 dengan nama *Blue Ribbon Sports*, tetapi nama ini kemudian diganti menjadi Nike pada tahun 1971. Perusahaan ini pun menjadi sebuah perusahaan yang terbuka mulai bulan Desember 1980 dan perusahaan ini bergerak di bidang desain, pengembangan, pemasaran serta penjualan alat-alat olahraga. Perusahaan ini beroperasi di Amerika Utara, Eropa, Tiongkok, Jepang, dan terus memperluas pasarnya di dunia.⁶⁴ Hal ini berawal dari kerjasama antara Bill Bowerman dan pelari dari Universitasnya yakni Phil Knight karena mereka mengira bahwa mereka dapat merancang dan mendesain sepatu ke pelari. Merek Nike terkenal sangat cepat dan tersebar di seluruh dunia, dengan logo Swoosh serta slogan yang berbunyi “*Just Do It*”.

Sepanjang perjalanannya, Nike membantu atlet-atlet dunia memenangkan kejuaraan, lalu para atlet pun ikut membantu Nike merancang dan memasarkan produk dan merek yang mengubah wajah olahraga. Pada tahun 1984, pemain bola basket Michael Jordan menandatangani sebuah kontrak atas dukungannya dengan Nike dan mengeluarkan model pertama sepatu olahraga bernama Nike Air Jordan. Namun, NBA melarang sepatu tersebut yang menyebabkan Nike Air Jordan menjadi penghambat kenaikan Nike menuju kesuksesan. Saat ini Nike memproduksi berbagai macam produk, termasuk sepatu untuk lari, tenis, golf, dan

[pembangunan-infrastruktur-pemerintahan-jokowi/](#) diakses pada tanggal 8 April 2018 pukul 17.55

⁶⁴ *Ibid*

skateboard serta pakaian olahraga untuk pelari. Nike juga memiliki *Hurley International* dan *Converse* dan menjadi sponsor berbagai atlet dan tim olahraga terkenal untuk mendapatkan pengenalan merek.⁶⁵

Dari kota kecil di Oregon, Nike berkembang menjadi perusahaan atletik terbesar di dunia dan menjadi sebuah organisasi global yang beragam dan kompleks dengan menjual produk lebih dari 170 negara dengan 30.000 pegawai di seluruh dunia. Mereka juga memiliki 12 merek pakaian yang juga melayani 30 cabang olahraga. Mereka menjalin kerjasama dengan 600 lebih rekan kerja serta melayani jutaan konsumen dengan ribuan produk yang telah dihasilkan. Nike terbilang sangat strategis dalam menambahkan Nike Brand-nya demi menjadi perusahaan yang kuat dan fleksibel untuk perkembangan perusahaannya. Masing-masing merek yang berasal dari Nike pun terus memperkuat kemampuannya untuk memaksimalkan jangkauan dan relevansi di seluruh dunia.⁶⁶ Nike mendapatkan peluang besar ketika ada peristiwa olahraga dunia seperti Piala Dunia FIFA dan Olimpiade untuk mempromosikan merek dan produknya dan dengan adanya promosi tersebut Nike mendapat keuntungan dari dukungan dan iklan. Lini produk dan inovasi yang dikeluarkan oleh Nike sangat berperan penting dalam mendongkrak penjualannya.⁶⁷ Terkait dengan perkembangan perusahaannya, Nike pun berkomitmen akan konsisten dalam pertumbuhan yang menguntungkan dalam jangka waktu yang panjang.

⁶⁵ "NIKE", dalam <https://www.ufx.com/id-id/aset/saham/nike/> diakses pada tanggal 9 Maret 2018 pukul 17:39

⁶⁶ Nike Inc, "A Growth Company", dalam http://media.corporate-ir.net/media_files/IROL/10/100529/nike-gs09/docs/nike-growth-story.pdf diakses pada tanggal 9 Maret 2018 pukul 17:20

⁶⁷ "NIKE", dalam <https://www.ufx.com/id-id/aset/saham/nike/> diakses pada tanggal 9 Maret 2018 pukul 17:39

Di akhir tahun 1980, Indonesia melakukan pembukaan sektor ekonomi yang lebih besar menuju persaingan yang lebih baik. Mereka menghilangkan penghalang yang besar dalam hal perdagangan dan industrialisasi. Mereka membongkar monopoli dan menstimulasi persaingan di dalam ekonomi global. Hubungan antara kedua belah pihak merupakan pengalaman yang saling menguntungkan karena Indonesia telah mendapatkan banyak manfaat dari hubungannya dengan Nike. Seperti saat Menteri Perindustrian Saleh Husein meresmikan pabrik yang memproduksi sepatu Nike di Garut, Jawa Barat. Pabrik yang dimiliki oleh PT Changshin Reksa Jaya merupakan pengembangan pabrik milik Changshin Group di Karawang. Investasi pabrik Changshin ini mencapai USD 60 juta atau setara Rp 720 miliar dengan kurs USD Rp 12.000. Menperin mengapresiasi pabrik ini karena dapat membuka pekerjaan bagi masyarakat Garut dan menumbuhkan perekonomian nasional. Kapasitas produksinya pun terhitung sebesar 15 juta pasang per tahun serta menyerap tenaga kerja saat ini yaitu 1.700 orang dan akan menjadi 5.500 orang pada tahun 2016. Menteri juga mengatakan bahwa orientasi perusahaan ini yang mengekspor seluruh produk sepatu Nike sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong peningkatan ekspor non migas dan peningkatan penyerapan tenaga kerja nasional. Saleh Husein juga berharap Changshin dapat mempromosikan Indonesia sebagai basis produksi industri sepatu kepada investor dari Korea untuk berinvestasi di Indonesia dikarenakan dapat membuktikan bahwa iklim bisnis di Indonesia menarik minat pemodal global.⁶⁸

⁶⁸ "Kementerian Perindustrian Resmikan Pabrik Sepatu Nike di Garut", dalam <http://www.kemenperin.go.id/artikel/11822/Menperin-Resmikan-Pabrik-Nike> diakses pada tanggal 15 Maret 2018 pukul 20.32

Namun, dalam perjalanan menuju kesuksesannya Nike mengorbankan para buruh yang bekerja di Indonesia. Dalam hal ini, Nike dikecam oleh warga dunia karena menjual kaos tim olahraga Inggris seharga US\$ 150 atau Rp 1,7 juta, tapi hanya memberi upah buruh pabrik di Indonesia dengan bayaran 50 sen atau Rp 5.600 per jam untuk memproduksi kaos tersebut. Tidak hanya itu, keuntungan yang didapatkan oleh Nike menjadi isu yang diangkat dalam memperjuangkan hak buruh pabrik di Indonesia. Karena sejauh ini, laba Nike tercatat mencapai 15,6 miliar pound sterling atau sebanyak Rp 297,4 triliun. Sementara CEO Nike sendiri menerima upah sebesar 9,2 miliar pound sterling atau sebanyak Rp 175,4 triliun. Tetapi, keringat para buruh Nike yang bekerja setiap hari membuat produk-produk mahal tersebut hanya dibayar dengan upah rendah yaitu Rp.5.600/jam.⁶⁹

Hal ini sesuai dengan teori yang digunakan oleh penulis yaitu teori hegemoni Gramsci bahwa buruh pabrik Nike di Indonesia secara tidak langsung dihegemoni oleh kehadiran pabrik tersebut didaerahnya. Berbagai masalah yang ditimbulkan seperti kekurangan gizi serta buta huruf terhadap anak-anak mereka menyebabkan para buruh tidak ada pilihan selain memanfaatkan peluang kerja yang ada di pabrik tersebut guna memenuhi kebutuhan mereka serta membantu menyelesaikan permasalahan yang mereka alami.

⁶⁹ <http://bisnis.liputan6.com/read/2035119/nike-dikecam-gara-gara-kasih-upah-rendah-ke-buruh-ri> diakses pada tanggal 9 Maret 2018 pukul 23.22